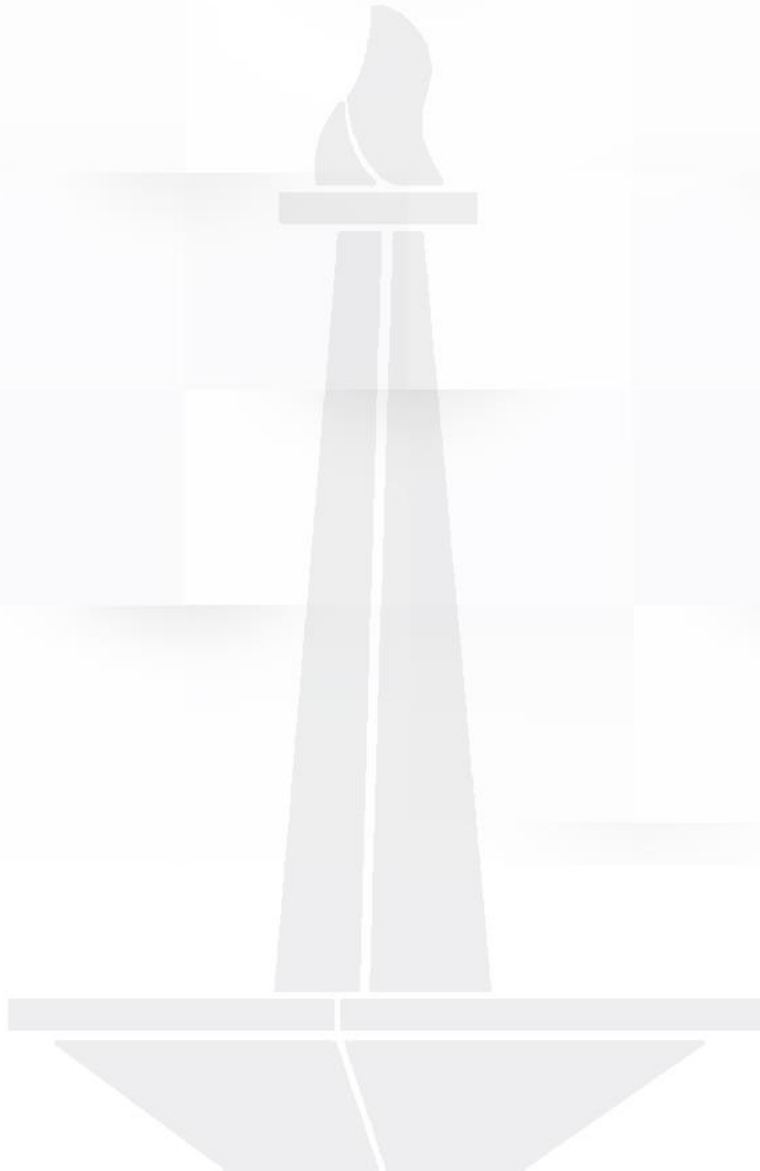




INFORMASI PPID BIRO HUKUM



PROFIL PIMPINAN



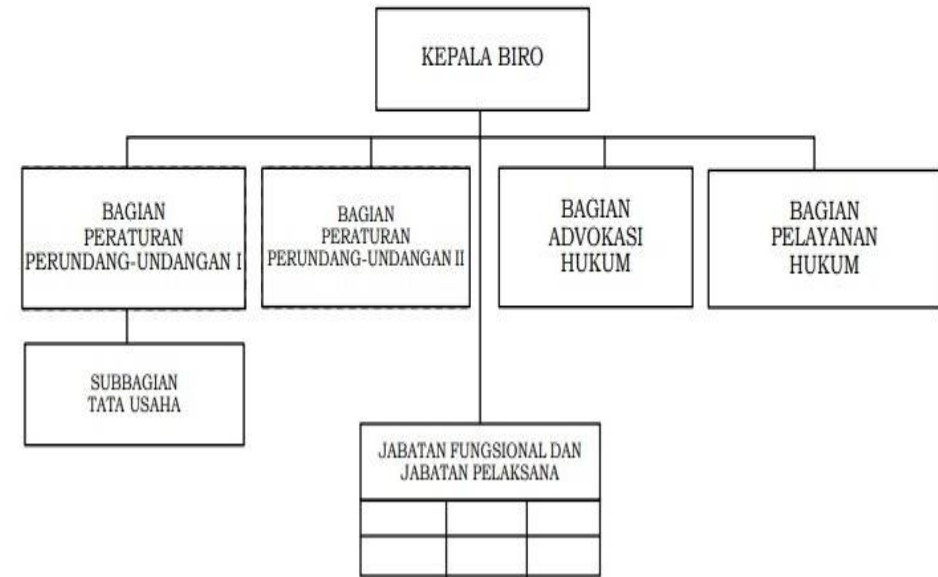
Sigit Pratama Yudha , S.H, M.H

Yogyakarta, 6 Desember 1977

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta

27 September 2023 – saat ini

3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM



PROFIL BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dengan tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia.

VISI

- Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua

MISI

- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, mengerakkan dan memanusiakan
- Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kesetaraan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang
- Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mngabdi melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kofa dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas
- Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
- Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Tugas dan Fungsi

1. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia.
2. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - b) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
 - c) pelaksanaan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah, advokasi hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan pengetahuan hak asasi manusia;
 - d) pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian serta pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan produk hukum daerah;
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah;

- f) pelaksanaan pelayanan perkara nonlitigasi;
- g) pelaksanaan advokasi hukum perkara litigasi;
- h) pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, publikasi, sosialisasi, dokumentasi, pengelolaan kearsipan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- i) peningkatan pengetahuan Hak Asasi Manusia;
- j) pelaksanaan kesekretariatan Biro Hukum;
- k) perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Hukum;
- l) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Biro Hukum; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum; dan
- m) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten Pemerintahan.

Berdasarkan Pergub No.57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

2. LAYANAN BIRO HUKUM

Jdih.Jakarta.go.id

Eproduk hukum

E perkara

Satudata.Jakarta.go.id

4. INFORMASI

- Informasi Berkala
 - Program dan Kegiatan yang sedang dilakukan
 - Laporan akuntabilitas keuangan
 - Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Hari
 - ✓ Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik
 - ✓ Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - ✓ Informasi mengenai pedoman pengelolaan organisasi Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - ✓ Informasi mengenai pedoman pengelolaan administrasi Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - ✓ Informasi tentang Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 - ✓ Dokumen Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

- DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- PPID Kepala Biro Hukum telah menetapkan keputusan PPID Kepala Biro Hukum tentang Daftar Informasi Publik Biro Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk mengakses Daftar Informasi Publik silahkan mengunjungi

- DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PPID Biro Hukum telah menetapkan daftar Informasi Dikecualikan yang telah dimutakhirkan pada tahun 2023.
- Untuk mengakses Daftar Informasi Dikecualikan Silahkan kunjungi :

5. KONTAK KAMI

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Gedung Balaikota Blok G Lt.9, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir Jakarta Pusat, 10110
- Email: birohukum@jakarta.go.id
- Tlp/Fax: 021-3822715/3822014
- IG: @birohukum.dki

